



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2018 - 2019.
Masa Persidangan ke	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pariwisata RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 20 Juni 2019.
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr.H.Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Evaluasi Daya Serap APBN Tahun 2018; 2. Pelaksanaan dan Daya Serap Semester I APBN TA 2019; 3. Pembahasan RKA/RKP-K/L Tahun 2020.
Hadir	: 41 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Arief Yahya/Menteri Pariwisata RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul **14.40** WIB oleh **Dr.H.Abdul Fikri Faqih, MM** Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpar RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Realisasi daya serap APBN TA 2018

Terhadap selisih pagu APBN TA 2018 antara hasil rapat kerja 19 Oktober 2017 (sebesar **Rp3.733.408.080.000**) dengan bahan Raker hari ini 20 Juni 2019 (sebesar **Rp3.737.618.611.000**), dimana terdapat selisih **Rp4.210.531.000**, Komisi X DPR RI meminta kepada Kemenpar RI untuk menyampaikan penjelasan tertulis kepada Komisi X DPR RI sebelum dilakukan rapat kerja berikutnya, dengan melampirkan surat dari Kemenkeu RI

2. Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2019

Kemenpar RI menyampaikan pelaksanaan APBN TA 2019 Kuartal I adalah sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran baru mencapai 7,0 % dari target EOY (*End of Year*), karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara *turnkey* yang pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai umumnya pada akhir tahun.
2. Realisasi Fisik YTD (*Year to Date*) di atas target (142,6%).
3. Realisasi Fisik EOY (*End of Year*) sebesar 28,5 % (di atas 25% atau di atas ¼ tahun anggaran)

Catatan:

Terhadap selisih pagu APBN TA 2019 antara hasil raker 24 Oktober 2018 (sebesar Rp3.831.062.805.000) dengan bahan raker hari ini 20 Juni 2019 (sebesar Rp3.831.172.805.000), dimana terdapat selisih sebesar Rp110.000.000, Menteri Pariwisata RI menjelaskan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan kurs dollar Amerika untuk anggaran hibah.

3. Pembahasan RKA/RKP-K/L Tahun 2020:

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan RI Nomor S-338/MK.02/2019 dan Nomor B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2020 tanggal 29 April 2019, Kemenpar RI mendapatkan pagu indikatif RAPBN TA 2020 sebesar **Rp4.027.200.491.000** (*Empat triliun duapuluh tujuh miliar duaratus juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Pagu Indikatif
1	Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan kepariwisataan	1.397.450.214.320
2	Deputi Bidang Pengembangan destinasi Pariwisata	250.451.577.000
3	Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata I	1.118.180.929.624
4	Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II	914.875.306.056
5	Sekretariat Kementerian	346.242.464.000

4. Sikap dan Pandangan Komisi X DPR RI:

- a. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemenpar RI yang telah mendapatkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut (tahun 2015 sampai dengan 2018). Selanjutnya, Komisi X DPR RI mengharapkan agar prestasi tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

- b. Komisi X DPR RI telah mengetahui bahwa Pagu Indikatif Kemenpar RI pada RAPBN TA 2020 sebesar **Rp4.027.200.491.000** (*Empat triliun duapuluh tujuh miliar duaratus juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan pagu indikatif pada RAPBN TA 2019 sebesar **Rp3.513.169.304.000,00,-** (*tiga triliun lima ratus tiga belas miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah*). Hal ini harus diikuti dengan proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan secara terukur, terkontrol dan komprehensif.
- c. Komisi X DPR RI mempertanyakan Kemenpar RI mengenai usulan perubahan target kunjungan wisman pada tahun 2020 menjadi 18,5 juta kunjungan, sehingga terjadi penurunan dari target tahun 2019 sebesar 20 juta kunjungan.
- d. Dalam pembahasan RKP dan RKA Kemenpar RI ke depan, Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk:
 - 1) Menyajikan basis data yang digunakan, rujukan, target dan sasaran dalam penyusunan RKP dan RKA TA 2020, serta menyajikan review kendala, capaian program dan kegiatan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sebagai bahan rujukan penyusunan RKP dan RKA Kemenpar RI tahun 2020.
 - 2) Melakukan kajian mengenai permasalahan akses transportasi, seperti kenaikan harga tiket pesawat yang dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan.
 - 3) Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
 - 4) Mempertahankan prestasi wisata halal dan melakukan sosialisasi mengenai konsep wisata halal secara komprehensif.
 - 5) Meningkatkan SDM Pariwisata melalui penguatan pendidikan pariwisata baik pendidikan di bawah Kemenpar RI maupun Kemenristekdikti RI.
- e. Berdasarkan Pasal 227 ayat (3) UU MD3, Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk menyampaikan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan APBN TA 2019, untuk menjadi salah satu bahan rujukan pembahasan RKP dan RKA Kemenpar RI TA 2020.
- f. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian dan pendalaman terhadap bahan yang disampaikan Kemenpar RI hari ini, sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan RKP dan RKA Kemenpar RI TA 2020, setelah dibacakan nota keuangan APBN TA 2020 oleh Presiden RI pada sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2019.
- g. Komisi X DPR RI dengan Kemenpar RI sepakat untuk memperjuangkan kenaikan/penambahan anggaran Kemenpar RI sesuai usulan yang disampaikan pada raker hari ini 20 Juni 2019 pada RAPBN TA 2020 sebesar **Rp10.000.000.000.000** (*sepuluh triliun rupiah*). Untuk itu, Kemenpar RI akan mengadakan RDP dengan Komisi X DPR RI untuk membahas usulan tersebut.

5. Lain-Lain

- a. Komisi X DPR RI dan Menpar RI sepakat akan mengagendakan Pembahasan RKP-K/L dan RKA-K/L TA 2020 pada akhir Juni 2019 (*tentatif*), dengan agenda penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, organisasi, dan program kegiatan K/L sesuai hasil pembahasan Banggar pada Masa Sidang V Tahun 2018-2019.
- b. Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk menyerahkan penjelasan atau jawaban atas seluruh pertanyaan, masukan dan tanggapan anggota Komisi X DPR RI secara tertulis paling lambat tanggal 27 Juni 2019.

II. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **17.40** WIB